

Memperbincangkan Standarisasi

Beberapa hari terakhir, ada isu menarik tetapi agaknya aneh, yaitu tentang standarisasi kemabruran haji. Menarik karena mungkin dianggap aktual dan sebagai hal baru. Disebut aneh, karena tidak sepatutnya dilakukan, karena hal itu bukan menjadi otoritasnya.

Persoalan standarisasi terhadap sesuatu memang perlu. Dengan adanya standar maka sesuatu menjadi jelas. Standar itu memberikan petunjuk atau ukuran, sehingga siapapun yang berkepentingan akan menyesuaikan. Apalagi, dalam kehidupan modern seperti ini, orang sehari-hari dituntut berpikir rasional dan juga melakukan pilihan obyektif dan rasional maka memerlukan kejelasan, sehingga standarisasi itu menjadi perlu.

Biasanya standar itu ditentukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Seseorang misalnya, membutuhkan karyawan, maka yang bersangkutan menentukan standar itu. Siapapun bisa diterima menjadi karyawan kantor manakala memenuhi standar, misalnya lulus SMK kejuruan, menguasai bahasa Inggris dan Arab, memiliki pengalaman kerja, tinggi badan 160 cm, rajin shalat berjama'ah, dan seterusnya.

Dengan standar itu maka siapapun yang ingin mendaftar diri menjadi karyawan dimaksud akan menjadi jelas. Jika seseorang tidak memenuhi standar itu maka tidak akan coba-coba mendaftarkandiri, karena akan ditolak. Kejelasan terhadap standar itu juga akan mengurangi penyimpangan yang tidak perlu. Selain itu, masyarakat akan menjadi jelas, karena bersifat terbuka, dan siapapun boleh mengontrolnya.

Standar juga bisa ditentukan oleh pihak yang akan memproduksi atau menghasilkan sesuatu. Sebuah pabrik atau perusahaan akan memproduksi barang atau jasa dengan ukuran atau standar tertentu. Standar itu bisa jadi, dibuat bertingkat-tingkat, misalnya berkualitas unggul, sedang, dan rendah. Siapapun yang berkepentingan akan mengambil pilihan mana yang diinginkannya.

Akhir-akhir ini, pemerintah juga memulai memperkenalkan tentang standar pendidikan. Bahwa dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan harus memenuhi standar, misalnya standar kurikulum, standar sarana dan prasarana, standar kualitas pendidik, biaya pendidikan, hingga standar lulusan yang dihasilkan. Lembaga pendidikan apapun agar mendapatkan pengakuan pemerintah, maka harus memenuhi standar yang ditentukan.

Menyangkut standarisasi seperti itu juga telah dikenal dalam Islam. Bahkan kitab suci al Qur'an dan juga hadits nabi telah memberikan standar-standar tertentu terhadap banyak hal. Misalnya, dalam al Qur'an disebutkan tentang siapa orang yang bertaqwa, orang kafir, orang munafiq, orang mukmin, dan seterusnya.

Dalam al Qur'an disebutkan bahwa, sebagai seorang yang bertaqwa adalah orang yang beriman pada yang ghaib, mendidikan shalat, menginfakan sebagian rezkinya kepada orang lain, mengimani terhadap kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah, dan yakin akan datangnya hari akhir. Begitu juga disebut sebagai seorang yang beriman, yaitu adalah orang yang merasa gemetar tatkala disebut nama Tuhan, bertambah imannya tatkala dibacakan ayat-ayat Allah, dan selalu bertawakkal kepada-Nya.

Tentu, masih banyak hal lagi yang distandarkan oleh al Qur'an, bahkan juga standar tentang hal tertentu yang disampaikan oleh nabi. Misalnya, standar terkait seseorang boleh melakukan pernikahan, standar wali nikah, standar sebagai seorang hakim agar diperoleh rasa adil, dan lain-

lain. Dengan standar itu maka siapapun menjadi jelas dan ternyata al Qur'an maupun hadits nabi juga telah memberikan ukuran-ukuran atau standar itu.

Namun standar kemabruiran haji, yang kabarnya diusulkan oleh anggota DPR tersebut, terasa aneh karena akan dibuat oleh pihak yang sama sekali bukan otoritasnya. Haji disebut mabrur atau tidak, sebenarnya adalah merupakan otoritas Tuhan. Bukan otoritas siapapun, selain-Nya. Oleh karena itu, siapapun tidak boleh ikut membuat standar itu. Kalau pun akan membuat pasti akan salah dan menyesatkan. Sebab yang menentukan kemabruran haji adalah Tuhan sendiri. Bahkan manusia tidak akan tahu, apakah hajinya sendiri mabrur atau tidak.

Oleh karena itu, kalau benar bahwa DPR akan membuat standar kemabruran haji, maka hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak tahu apa yang disebut haji, dan apalagi haji mabrur itu sendiri. Namun, kalau mereka ingin dianggap kreatif, terkait dengan standarisasi ini, maka silahkan saja membuat standar anggota DPR yang dianggap ideal. Misalnya standar itu : (1) memiliki latar belakang pendidikan tertentu, (2) tidak pernah bohong, (3) membenci perbuatan korup, (4) benar-benar mencintai rakyat, dan lain-lain. Menangani hal seperti itu lebih tepat daripada membuat sesuatu yang bukan otoritasnya. *Wallahu a'lam.*